BAB II

BULAN DANA PMI CABANG KOTA BANDUNG

2.1 Bulan Dana

2.1.1 Pengertian



Gambar 2.1 Kartu Tanda Terima Sumbangan (TTS)
(Dokumentasi PMI)

Menurut Kristin Munandar selaku Kepala Subbag Infokom & Organisasi PMI Kota Bandung, Bulan Dana merupakan pengumpulan dana yang dilakukan di masyarakat yang diselenggarakan selama tiga bulan yaitu dari Juli hingga September dan biasanya diperpanjang selama dua atau tiga bulan jika belum mencapai target yang telah ditentukan oleh PMI. Sebelum membagikan kupon kepada masyarakat, PMI harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Walikota setempat dan Dinas Sosial untuk melaksanakan pengumpulan dan di masyarakat. Setelah mendapatkan ijin dari Walikota dan Dinas Sosial, barulah PMI bisa melaksanakan Program Bulan Dana tersebut. Tujuan dari program ini adalah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesamanya.

2.1.2 Awal Mula Bulan Dana

Menurut Kristin Munandar selaku Kepala Subbag Infokom & Organisasi PMI Kota Bandung mengatakan semenjak dimulainya program ini yaitu sekitar tahun 1970-an, pada awalnya program ini pihak PMI langsung turun ke jalanan dengan membawa semacam kotak amal untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian PMI berpikir jika langsung terjun ke jalanan maka akan banyak waktu yang terbuang. Untuk itu dibuatlah kupon yang didalamnya tercantum nominal sumbangan yang akan diberikan entah itu besarnya Rp 500, Rp 1.000, Rp 5.000, Rp 10.000 dengan bekerjasana pada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga.

Dari awal dimulainya program ini, PMI Kota Bandung tidak bergantung kepada pemerintah, yang memiliki filosofi bahwa PMI merupakan sebuah organisasi yang mandiri. Ini merupakan wujud pengabdian PMI terhadap masyarakat di bidang sosial kemanusiaan.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor:466.2/618/Dinsos/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Dana Kepada PMI Cabang Kota

Bandung tanggal 8 Juni 2010, dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Dana ini adalah sebagai berikut:

1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawab Barat Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Penertiban Kegiatan Meminta Sumbangan di jalan-jalan dan tempat keramaian.
4) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 466.2/KEP/1023-Bangsos/2002 Tentang Panitia Pertimbangan Pemberian Ijin/Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang.
5) Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 468/2187/Bangsos Tanggal 1 Juni 2010 Tentang Bantuan dan Dukungan pada Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010.
6) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

2.3 Mekanisme Kerja Bulan Dana

Seperti yang diungkapkan oleh Kristin Munandar, bahwa mekanisme kerja Bulan Dana adalah sebagai berikut:

1. PMI yang akan menyelenggarakan Bulan Dana harus meminta surat perijinan mengenai sumbangan di masyarakat kepada PMI Pusat dan Departemen Sosial.

2. Kemudian meminta surat perijinan kepada PMI Daerah.
3. Setelah itu keluarlah landasan mengenai kegiatan Bulan Dana, akan tetapi belum bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut.
4. Lalu meminta ijin kepada Pemerintahan Kota Dinas Sosial mengenai kegiatan tersebut.
5. Maka keluarlah Surat Keputusan untuk melaksanakan Program Bulan Dana dari Walikota setempat.
6. Barulah PMI bisa menyebarkan kupon Bulan Dana kepada bidang-bidang yang terkait dengan program ini dan harus mendapat persetujuan dari ketua bidangnya terlebih dahulu.

2.4 Klasifikasi Bulan Dana

Menurut Ketua Umum Bulan Dana PMI Kota Bandung 2011, Nani Dada Rosada, sebagai alat operasioal Bulan Dana PMI, panitia menyediakan kartu derma bagi para pengusaha dan donatur, kupon TTS (Tanda Terima Sumbangan) nominal Rp 500, Rp 1.000, Rp 5.000 dan Rp 10.000.

Sedangkan menurut Surat Pedoman dan Tata Kerja Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2010 Nomor : 22/BD.PMI Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai klasifikasi Bulan Dana sendiri dibagi dalam 8 bidang sasaran, diantaranya adalah:

Bidang 1 (Sumber Pendapatan) melalui sektor hiburan, perhotelan dan rumah-makan, pajak reklame.

Bidang 2 (BUMN/BUMD) melalui pelanggan PDAM, listrik, telepon, penumpang kereta api berkelas.

Bidang 3 (Perpasaran, Pelayanan Akte Kelahiran) pedagang pasar, pelayanan pembuatan akte kelahiran, rekanan pemerintah kota, gabungan pengusaha, pengusaha pompa bensin, pelayanan masyarakat di kecamatan, toko umum, pengusaha menengah dan PKL resmi, factory oulet dan mall.

Bidang 4 (Perijinan) melalui pemohon SIM, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, kir mobil dan bongkar muat, pemohon Paspor, pelayanan sertifikat tanah dan pelayanan satu atap.

Bidang 5 (PNS) melalui kolektor DPC Korpri, unit ranting dan sub unit Korpri.

Bidang 6 (Siswa Sekolah Negeri dan Swasta) melalai TK, SD, SMP, SMA, SMK.

Bidang 7 (Bidang Kesehatan) melalui apotik, laboratorium, balai pengobatan swasta, rumah sakit negeri dan swasta, klinik bersalin.

Bidang 8 TNI dan PNS.

2.5 Usaha yang Pernah Dilakukan



Gambar 2.2 Spanduk Bulan Dana
(Dokumentasi PMI)

Menurut Cepi Hermawan selaku Staf Bidang Humas PMI Kota Bandung mengatakan bahwa langkah yang telah dilakukan PMI Kota Bandung agar masyarakat mau mendukung berjalannya Program Bulan Dana sangat minim antara lain adalah dengan membuat iklan berjalan di televisi lokal Bandung sebagai rasa ucapan terima kasih karena telah mendukung program ini, walaupun jarang sekali dilakukan. Kemudian melakukan iklan di berbagai radio-radio lokal di Bandung. Juga memasang spanduk-spanduk di jalanan yang mendapat izin dari pemerintah selama 30 hari dengan bertemakan mendukung program tersebut, akan tetapi spanduk itu baru 3 hari setelah dipasang yang pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Menempelkan stiker di bidang – bidang yang terkait dengan Bulan Dana PMI. Dan yang paling sering dilakukan adalah dari mulut ke mulut seperti di perusahaan-perusahaan, instansi-instansi dan lain-lain.

2.6 Hasil Bulan Dana

Menurut H. Denni Candrasah selaku Wakil Sekretaris PMI Provinsi Jawa Barat mengatakan untuk hasil bersih Bulan Dana itu sendiri dialokasikan ke beberapa pengurus, diantaranya adalah 5% untuk Pengurus Pusat, 10% untuk Pengurus Daerah, dan 85% untuk Pengurus Cabang. Alokasi dana tersebut digunakan pengurus cabang untuk peanggulangan bencana, pelatihan, pembinaan generasi muda dan pelayanan transfusi darah yang dilakukan oleh PMI. Pencapaian Bulan Dana PMI Kota Bandung memang dari tahun ke tahun selalu mencapai target, akan tetapi pencapaian target tersebut bisa terealisasikan setelah diperpanjang waktunya selama 2 hingga 3 bulan lamanya.

Kristin Munandar selanjutnya mengatakan bahwa Bulan Dana PMI Kota Bandung tahun 2007 menargetkan 850 juta dan tercapai 828 juta (97,43%). Pada tahun 2008, PMI Bandung menargetkan 850,5 juta dan yang terkumpul 968 juta (113,82%). Pada tahun 2009 menargetkan 900 juta yang tercapai adalah 1.065 juta (118,34%). Pada tahun 2010 kemarin menargetkan 900 juta dan dana yang terkumpul adalah 996 juta (110,70%). Sebagai contoh, pada tahun 2010 kemarin dalam kurun waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 3 bulan, target yang telah dicapai PMI sampai akhir September baru mencapai 25%. Penurunan hasil Bulan Dana pada tahun 2010 kemarin disebabkan layanan masyarakat seperti pembayaran listrik, telepon, air sudah semakin berkurang pelanggannya karena

pelanggan sekarang membayarnya melalui bank. Sementara itu, dari pihak bank sendiri tidak mau ada kupon sumbangan PMI karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pungutan harus ada ijin dari pimpinan pusat. Selain itu juga, yang mengalami penurunan hasil Bulan Dana 2010 kemarin adalah kurang gencarnya melakukan publikasi yang dilakukan oleh PMI mengenai Bulan Dana sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat akan program ini.

Hasil dari Program Bulan Dana akan diumumkan disetiap kelurahan atau kecamatan melalui rapat antar warga. Dan biasanya disebutkan untuk apa saja hasil dari program ini. Program ini berjalan 3 bulan, namun jika belum mencapai target maka perlu perpanjangan waktu selama 2 hingga 3 bulan. Setelah waktunya diperpanjang, target yang dicapai bisa terealisasikan bahkan bisa melebihi target. Dalam kurun waktu yang diperpanjang tersebut, biasanya Ketua Umum Bulan Dana PMI 2011 Kota Bandung yaitu Nani Dada Rosada akan melakukan kunjungan ke berbagai instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait yang masih bermasalah dan beliau menyuruh kepada masing-masing pimpinan agar lebih meningkatkan lagi minat orang untuk turut menyumbang. Hal ini bisa terjadi karena petugas di lapangan kurang mengerti dalam pelaksanaannya.



Gambar 2.3 Penyerahaan Penghargaan
(Dokumentasi PMI)

Untuk acara penutupan Program Bulan Dana tahun 2010 itu sendiri diselenggarakan di kediaman Gubernur Jawa Barat yaitu Dada Rosada yang menyerahkan piagam penghargaan kepada ketua PMI sebagai ucapan terima kasih karena telah berjalannya program ini. Selain menyerahkan kepada PMI, piagam tersebut diberikan kepada instansi-instansi, lembaga-lembaga yang terkait dengan proses terselenggaranya program ini.

2.7 Biaya Penyelenggaraan dan Operasional Bidang

Berdasarkan Surat Pedoman dan Tata Kerja Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2010 Nomor: 22/BD.PMI Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai segala macam biaya Bulan Dana adalah sebagai berikut:

2.7.1 Biaya Penyelenggaraan

Biaya penyelenggaraan Bulan Dana PMI jumlah seluruhnya maksimum 10% dari seluruh perolehan uang sumbangan yang diterima oleh panitia dengan alokasi penggunaan untuk biaya

cetak alat operasional, pengganti transportasi panitia, biaya rapat panitia dan biaya publikasi / dokumentasi.

Untuk tertib administrasi, maka penerimaan dan pengeluaran uang diatur sebagai berikut:

1. Seluruh penerimaan uang hasil Bulan Dana harus ditandatangani oleh Bendahara / Wakil Bendahara Panitia.
2. Setiap pengeluaran uang harus diajukan dengan nota persetujuan kepada Ketua Umum dan Bendahara Panitia.
3. Pengeluaran uang harus dengan kwitansi pengeluaran Panitia dilampiri buku kwitansi / faktur pembelian.
4. Diajukan melalui pengawasan / pengendalian.
5. Untuk jumlah sampai dengan Rp 1.000.000 disahkan oleh Sekretaris Panitia dan untuk jumlah diatas Rp 1.000.000 oleh Bendahara Panitia.
6. Pembayaran dilaksanakan oleh Keuangan Panitia.

2.7.2 Operasional Bidang

Biaya operasional dan administrasi masing-masing bidang diatur / ditetapkan oleh Ketua Bidang yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. Jumlah seluruh biaya maksimum 10% dari jumlah perolehan uang sumbangan bidang yang bersangkutan dengan alokasi penggunaan untuk:
    - Biaya operasional kolektor dan para pelaksana.
    - Biaya alat tulis kantor (ATK) Bidang.

- Biaya operasional (transport/BBM) petugas / Sekretaris Bidang.

2.8 Respon Masyarakat Mengenai Bulan Dana

Sementara itu, pandangan masyarakat mengenai hasil Bulan Dana sendiri mendapat respon yang tidak begitu baik. Hal ini disebabkan karena pihak PMI kurang mentransparansikan secara luas mengenai hasil dari program ini kepada masyarakat. Dari 75 orang yang telah diwawancarai langsung disebuah pembayaran listrik didaerah kecamatan Coblong, hanya 12 orang yang mengetahui untuk digunakan apa saja hasil dari Bulan Dana tersebut dan sisanya mereka tidak mengetahui.

Menurut salah seorang masyarakat mengatakan PMI hanya minta sumbangan saja setiap tahunnya, akan tetapi jika masyarakat sedang memerlukan darah harus membeli untuk mendapatkannya. Sebenarnya masyarakat rela hanya menyumbangkan Rp 1000 untuk PMI, namun mereka tidak mengetahui hasil dari sumbangan ini digunakan untuk apa saja oleh PMI. Ini yang menyebabkan mengapa ada sebagian masyarakat yang enggan untuk menyumbang.

2.9 Palang Merah Indonesia

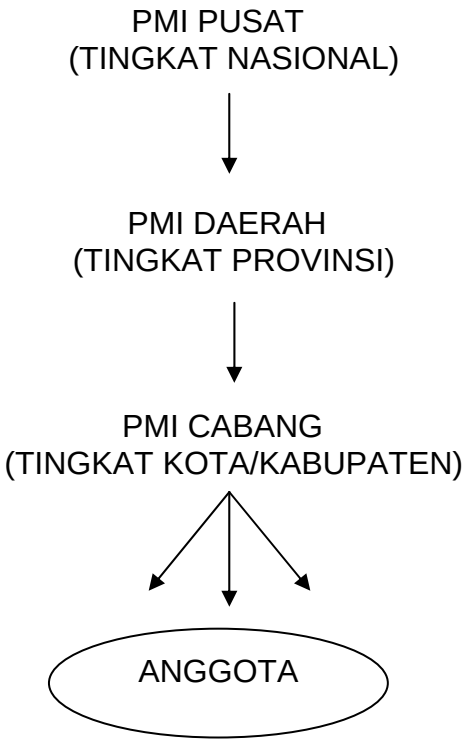
2.9.1 Pengertian

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama

manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong.

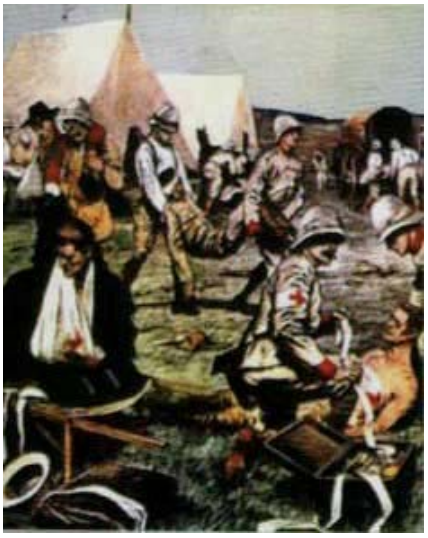
Organisasi ini berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keppres RIS No. 25 Tahun 1950, Keputusan Presiden RI No. 246 Tahun 1963, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972 sebagai satu-satunya organisasi di Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah menurut konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949.

Adapun struktur organisasi Palang Merah Indonesia seperti yang dibawah ini:



Tabel 2.1 Struktur Organisasi

2.9.2 Perihal PMI di Masa Lalu



Gambar 2.4 Perihal PMI
(http://www.scribd.com/doc/24456089/Sejarah-Palang-Merah-Indonesia)

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Adhyatnika di http://www.scribd.com/doc/24456089/Sejarah-Palang-Merah-Indonesia.html mengatakan bahwa Palang Merah Indonesia atau PMI sebagai Organisasi Nasional dan anggota Palang Merah Internasional, tergabung dalam ICRC atau Internasional Committee of The Red Cross dan League of Nation Red Cross Society atau Liga Palang Merah Sedunia Sejak tahun 1870 di zaman penjajahan Belanda dengan nama The Nederlands Indische Rode Kruis atau Palang Merah Hindia Belanda. Dan pada tahun 1939 seiring dengan timbulnya dorongan dan perjuangan kebangsaan, maka dua tokoh kebangsaan Dr. Rel Senduk dan Dr. Bahder Djohan mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk Palang Merah Indonesia. Meskipun ditolak untuk kedua kalinya tahun 1940

gagasan mulia ini diajukan kembali dan pemerintah Hindia Belanda tetap menolak.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945 telah dirintis kembali perjuangan pembentukan Palang Merah Indonesia tetapi belum juga dapat terwujud. Kemauan dan tekad yang membaja untuk membentuk Palang Merah Indonesia diteruskan karena tuntutan yang mendesak guna memberikan pertolongan kepada para korban pertempuran dalam perjuangan bangsa mengusir penjajah.

Dan barulah pada tanggal 3 September 1945 dikeluarkanlah perintah Presiden R.I kepadaMenteri Kesehatan dr. Boentaran Martoatmojo untuk menjajagi kemungkinan terbentuknya Palang Merah Indonesia tanggal 5 September 1945 dibentuklah panitia persiapan yang terdiri dari 4 orang adalah Dr. Mochtar, Dr. Bahder Djohan, Dr. Sitanala, Dr. Djoehana. Panitia empat inilah bertugas membentuk Palang Merah Indonesia.

Dan akhirnya pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah Perhimpunan Palang Merah Indonesia, bersamaan dengan dilantiknya pengurus besar PMI pertama adalah:

a) Ketua : Drs. Moh. Hatta
b) Wakil Ketua : Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
c) Badan Penulis : Dr. R. Mochtar, Dr. Bahder Djohan,

Mr. Santoso

d) Bendahara : Mr. T. Saubari

e) Penasehat : K.H. Raden Adrian

2.9.3 Visi dan Misi

Palang Merah Indonesia mempunyai visi dan misi yang dinyatakan dengan jelas, dengan kata lain, konsep yang jelas tentang apa yang ingin dilakukannya. Visi dan misi harus berpedoman pada Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta beroperasi sesuai dengan Prinsip Dasar.

Visi PMI adalah:

"Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada Prinsip-Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional".

Misi PMI adalah:

1. Menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara konsisten Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
2. Melaksanakan kesiapsiagaan didalam penanggulangan bencana dan konflik yang berbasis pada masyarakat.
3. Memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat.
4. Pengelolaan transfusi darah secara professional.

5. Berperan aktif dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA.
6. Menggerakan generasi muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
7. Meningkatkan kapasitas organisasi di seluruh jajaran PMI secara berkesinambungan disertai dengan perlindungan terhadap relawan dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
8. Pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi di jajaran PMI guna meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia, sumber daya dan dana agar visi, misi dan program PMI dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

2.9.4 Program Kerja PMI

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, PMI melakukan kerjanya diberbagai bidang, antara lain:

1. Bidang Pendidikan dan Latihan
   - Menyebarluaskan hasil pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
   - Inventarisasi dan pengingkatan mutu pelatih PMI.
   - Pembinaan generasi muda melalui kegiatan Jumpa Bakti dan Gembira (Jumbara) PMR dan Temu Karya KSR serta latihan bersama.

- Pelatihan Pendidikan Remaja Sebaya (PRS) untuk membantu remaja dalam menggulangi merebaknya korban Narkoba, HIV/AIDS

2. Bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana :
   - Penyiapan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGANA) di masing-masing Cabang dan Ranting.
   - Peningkatan kemampuan Tim SATGANA dan kelengkapan sarana dan prasarana.
   - Menyusun pendataan/peta daerah rawan bencana.
   - Menyiapkan logistik awal dengan kesiapan Posko Penanggulangan.
3. Bencana bekerjasama dengan Satlak PB :
   - Meningkatkan kemampuan pendataan dan layanan Tracing and Mailing Service (TMS).
   - Membentuk Tim inti/elit SATGANA yang diberi nama TBRC (Tim Bantuan Reaksi Cepat).
4. Bidang Tranfusi Darah.
   - Meningkatkan pelayanan UTDC secara maksimal dengan service cost yang rasional.
   - Pembinaan Donor Darah Sukarela melalui pertemuan, penyerahan piagam penghargaan.
   - Penyempurnaan peralatan di Unit Tranfusi Darah.
   - Meningkatkan mutu pelayanan melalui Uji Saring Darah.

5. Bidang Sarana dan Prasarana.

- Secara bertahap melengkapi sarana pendukung operasional.
- Perawatan / pemeliharaan sarana yang tersedia.
- Inventarisasi sarana sesuai penggunaannya.

2.10 Profil PMI Kota Bandung

Berdasarkan Publikasi Pemerintah tentang Sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Bandung menyatakan bahwa setelah Proklamsi Kemerdekaan RI, tepatnya bulan Oktober 1945 di Kota Bandung sering terjadi bentrokan antara Belanda dengan sekutu-sekutunya melawan pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam satuan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Akibat bentrokan tersebut korbanpun berjatuhan, baik dari pihak Belanda maupun pihak Indonesia.



Gambar 2.5 PMI Cabang Kota Bandung
(Dokumentasi Pribadi)

Keadaan PMI saat itu belum mengkonsolidasikan dirinya, karena menjelang penyerahan dari pihak Nederlandsch Rode Kruis Afdeling

Indie (NERKAI), atau Palang Merah Belanda di Indonesia. NERKAI pertama kali bermarkas di Palace Hotel, di jalan Kebonjati Bandung.

Pada saat itu Palang Merah Indonesia masih belum bisa berbuat banyak. Sarana dan logistik masih sangat minim, namun demikian dengan semangat tidak mengenal lelah dan penuh percaya diri para sukarelawan mampu memberikan pertolongan, baik PPPK, Dapur Umum, Obat-obatan maupun Perawatan terhadap Korban Perang. Sebelum peperangan reda, datang lagi musibah baru yaitu dengan meluapnya kali Cikapundung, pada tanggal 26 Nopember 1945 yang menghanyutkan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan penuh semangat dan keberanian anggota PMI memberikan pertolongan dan mengumpulkan mayat-mayat yang jumlahnya lebih dari lima ratus orang. Korban yang selamat ditampung oleh PMI dan kepada mereka diberikan makanan, obat-obatan bahkan perumahan, karena pada waktu itu Pemerintah Kota (Haminte) belum siap menanganinya.

Pergolakan Politik di Bandung terus berjalan, bentrokan fisik melalui kontak senjata sering terjadi. Malah pada tanggal 28 Nopember 1945, rakyat Bandung yang berada disebelah utara jalan kereta api, berduyun-duyun pindah ke selatan, sementara pertempuran terus berkobar. Markas PMI pun terkena mortil dan harus ikut pindah ke RS Situsaeur (RS Immanuel sekarang). Disamping menghadapi beberapa kesulitan, disaat itu ada hal yang menggembirakan, yaitu ditemukannya simpanan kapas dan oxygen yang jumlahnya puluhan

peti. Dari hasil temuan itu PMI dapat membantu daerah lain, seperti Jogyakarta dan Surabaya.

Di RS Situsaeur, PMI memberikan pertolongan dan perawatan kepada korban pertempuran dan pasien-pasien lainnya bersama-sama dengan jawatan kesehatan kota. PMI juga turut memelihara rumah sakit darurat yang ada di Soreang dan Ciparay Kabupaten Bandung. Pertempuran terus berlanjut peran PMI sangat dibutuhkan masyarakat terutama para korban perang. Untuk itu PMI membetuk pos-pos Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (PPPK) disepajang jalan besar dan mendirikan Rumah Sakit Darurat. Pada tanggal 24 maret 1946, pemimpin tentara sekutu dengan tegas meminta agar rakyat yang berada disebelah Selatan rel kareta api menyingkir dan meninggalkan kota sejauh sebelas kilometer dari pusat kota.

Pada saat itulah terjadi peristiwa yang sangat mengenaskan, yaitu di bumi hanguskannya Bandung, yang selanjutnya dikenal dengan peistiwa “Bandung Lautan Api“ dengan kejadian tersebut PMI lebih berperan lagi ikut memberikan Pertolongan Pertama pada peristiwa ini. Peristiwa tragis ini berjalan sampai tahun 1949.

Situasi Politik di Bandung mulai reda dan boleh dikatakan aman, PMI perlu dibenahi organisasinya. Oleh karena itu pada tanggal 26 Januari 1950 dibentuklah Kepengurusan PMI Cabang Bandung yang diketuai oleh Dr. Djoendjoenan Setiakusumah, dengan wilayah kerjanya meliputi Kotamadya dan Kabupaten Bandung. Menurut data di Markas Besar PMI, PMI Cabang Bandung berdiri pada tanggal 2 Oktober

1945 dengan pengesahan dari Pengurus Besar PMI tanggal 20 Maret 1960, sedangkan menurut data PMI Daerah Jawa Barat, PMI Cabang Bandung berdiri pada tanggal 26 Januari 1950.

2.11 Target Audiens

- Demografis

  Gender : Laki-laki dan Perempuan

  Usia : 25-35 tahun

  Ekonomi : Menengah ke atas

- Geografis

  Wilayah Kota Bandung.

- Psikografis

  - Memiliki peran penting dalam keluarga dan dapat bertanggungjawab serta dapat mengambil keputusan yang kehidupan sehari-harinya bersifat dinamis, konsuntif dan aktif.
  - Kurangnya rasa jiwa sosial terhadap sesama.